

Implementasi Nilai-nilai Pancasila pada Kearifan Lokal Masyarakat Baduy

Dinda Maryam Salima¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³
^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: dindamaryamsalima@upi.edu¹, dinieanggraenidewi@upi.edu²,
furi2810@upi.edu³

Abstrak

Tulisan pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kearifan lokal masyarakat Baduy. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan informasi serta data. Pengumpulan informasi dan data dihimpun dengan melakukan studi literatur pada jurnal-jurnal yang relevan dan telah ada sebelumnya. Hasil pembahasannya terdiri dari pertama, mengenal kearifan lokal masyarakat Baduy. Kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila pada kearifan lokal masyarakat Baduy. Implementasi tersebut berupa nilai-nilai kepercayaan yang terdapat pada masyarakat Baduy sesuai dengan sila kesatu Pancasila. Menjaga kelestarian alam sesuai sila kedua Pancasila. Menjaga warisan budaya sesuai sila ketiga Pancasila. Demokrasi sesuai sila keempat Pancasila. Gotong-royong sesuai sila kelima Pancasila. Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian dari kearifan lokal masyarakat Baduy.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai-nilai Pancasila, Masyarakat Baduy

Abstract

The writing in this article aims to explain the values of Pancasila contained in the local wisdom of the Baduy community. The research methodology used is a qualitative approach. Data is collected by collecting information and data. The collection of information and data was collected by conducting a literature study on relevant and previously existing journals. The results of the discussion consisted of first, getting to know the local wisdom of the Baduy community. Second, the implementation of Pancasila values in the local wisdom of the Baduy community. The implementation is in the form of belief values found in the Baduy community by the first principle of Pancasila. Preserving nature is the second principle of Pancasila. Maintain cultural heritage according to the third principle of Pancasila. Democracy is by the fourth principle of Pancasila. Gotong-royong according to the fifth principle of Pancasila. This research can be useful for readers and the community, especially those in the West Java region, to increase awareness in preserving the local wisdom of the Baduy community.

Keywords: Implementation, Pancasila Values, Baduy Society

PENDAHULUAN

Sebuah rujukan yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan kebangsaan dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan selalu mengikuti berlangsungnya kehidupan kebangsaan dan bernegara sepanjang Indonesia tetap ada. Sebagai pedoman negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dari zaman dahulu kala. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila diantaranya, nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan (Ningsih, 2021).

Saat kekalahan Jepang dari sekutu, Indonesia mendapatkan sebuah janji kemerdekaan. Langkah awal dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk BPUPKI

(Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dihadapan anggota-anggota BPUPKI Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Ir. Soekarno pernah berpidato mengenai dasar falsafah negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 dari pidato Presiden Ir. Soekarno, lahirlah sebuah dasar falsafah negara yang disebut Pancasila.

Fungsi Pancasila sebagai dasar falsafah negara haruslah menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang diakui dan tidak akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu (Muthmainnah, 2021). Terdapat makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sebagai berikut:

1. Makna Pancasila dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Makna dari sila pertama Pancasila yaitu negara Republik Indonesia memberikan kebebasan serta menjamin bagi setiap warga negaranya dalam memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang dianut. Selain itu, negara Indonesia memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada sila pertama ini, makna lainnya adalah bahwa Indonesia menjadi negara yang mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing warga negaranya (Muthmainnah, 2021).

2. Makna Pancasila dari sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Makna dari sila kedua Pancasila yaitu mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk dilakukan secara adil, beradab serta bermartabat. Hal tersebut tercermin dalam perilaku bermasyarakat di Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Sesuai dengan sila kedua ini, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dengan hukum dan budaya bangsa Indonesia (Supriyanto, 2016).

3. Makna Pancasila dari sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Makna dari sila ketiga Pancasila yaitu bermakna bahwa Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan segala keberagamannya. Keberagaman negara Indonesia seperti, suku, ras, budaya, agama, dan bahasa menjadi kekuatan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Keberagaman serta persatuan tersebut, sangat dijaga dengan sepenuh jiwa demi terciptanya negara Republik Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan makmur sesuai sila ketiga Pancasila. Selain itu, semangat persatuan merupakan sebuah cara agar bangsa Indonesia tetap terus memiliki dan menjalin hubungan yang rukun di tengah keberagaman.

4. Makna Pancasila dari sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Makna dari sila keempat Pancasila yaitu dalam mencapai sebuah mufakat atau kesepakatan, bangsa Indonesia memiliki cara yang sesuai dengan sila keempat ini. Dalam mencapai mufakat, bangsa Indonesia memilih melalui jalur musyawarah. Musyawarah merupakan bentuk perwujudan dari kehendak masyarakat, yaitu dari suara terbanyak sebagai mayoritas ataupun yang sedikit sebagai minoritas. Mayoritas maupun minoritas tetap diperlakukan adil dan sama untuk kepentingan yang universal (Wijaya, 2015).

5. Makna Pancasila dari sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Makna dari sila kelima Pancasila yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil tanpa memandang perbedaan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Seperti, suku, ras, budaya, agama, bahasa, atau status sosial tertentu. Oleh sebab itu, sila kelima ini bertujuan agar seluruh warga negara Republik Indonesia dapat diperhatikan dan diperlakukan secara adil dan sama oleh negara.

Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara. Pada bagian pembukaan, tercantum lima poin Pancasila yang menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Dalam menjadi pedoman ataupun pandangan hidup, Pancasila harus diposisikan seimbang dan tepat. Pancasila merupakan hasil dari sebuah perenungan dan pemikiran yang dilakukan para pendiri bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia

memiliki tujuan agar Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Mulyono, 2016).

Menurut Efendi (2020) memaparkan bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila di dalam Pancasila melambangkan karakter bangsa Indonesia serta diperlukan dalam kehidupannya. Asmaroini (2016) berpendapat tentang pedoman Indonesia yang dipaparkan mengandung nilai-nilai luhur yaitu pada sila yang pertama ialah terkandungnya nilai ketuhanan, sila kedua ialah nilai kemanusiaan, dalam sila yang ketiga yaitu mengandung nilai persatuan, selanjutnya mengandung nilai kerakyatan yang terdapat pada sila keempat, dan nilai keadilan pada sila terakhir. Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila yang dilakukan dapat mengajarkan masyarakat Indonesia dalam berpikir, bertindak atau berbuat yang sesuai ideologi negara (Damanhuri, 2016).

Nilai-nilai Pancasila yang luhur tersebut bisa kita temui dimana saja. Kita bahkan bisa melihatnya di komunitas masyarakat atau suku yang bahkan tertutup. Contohnya adalah suku Baduy. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat Suku Sunda yang masih mempertahankan adat tradisionalnya dengan ketat. Kawasan masyarakat Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, kelompok masyarakat Baduy Dalam dan kelompok masyarakat Baduy Luar. Masyarakat Baduy hidup membatasi diri dari interaksi dengan dunia luar, terutama kelompok masyarakat Baduy Dalam lebih ketat.

Kearifan lokal masyarakat Baduy merupakan adat istiadat serta tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat Baduy. Adat istiadat serta tradisi tersebut dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Baduy. Diantaranya, Sunda Wiwitan yaitu kepercayaan atau agama masyarakat Baduy, bercocok tanam, cara berpakaian, pengangkatan Puun/Raja pada masyarakat hukum adat Baduy, dan sistem gotong-royong pada masyarakat Baduy. Kearifan lokal tersebut merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima.

METODE PENELITIAN

Heriyanto (2018) menjelaskan mengenai metodologi penelitian kualitatif yaitu mengkaji serta memaparkan tentang keyakinan, perbuatan, peristiwa, pandangan sosial dari seseorang atau lebih. Penelitian ini diolah pada kondisi alami tau tidak ada elemen lain yang memasukinya. Kemudian, metode ini memiliki instrumen bagi peneliti untuk dapat menganalisis, mengkonstruksikan, memotret serta bertanya terkait keadaan sosial yang diamati sehingga lebih substansial. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat peneliti wajib untuk mempunyai bahan teori serta keluasan pengetahuan sebagai hal fundamental bagi peneliti. Studi literatur yang dilakukan untuk menghimpun segala bentuk data-data maupun informasi dari jurnal-jurnal relevan yang sudah ada sebelumnya. Pengkajian yang diambil yaitu secara historis dan filosofis pada data serta informasi yang telah dihimpun. Selanjutnya, dilakukan pemilihan serta pengkajian pada hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mengimplementasikan nilai-nilai pedoman Indonesia yaitu Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Kearifan Lokal Masyarakat Baduy

1. Pandangan Hidup Masyarakat Baduy

Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan atau agama dari masyarakat Baduy. Sunda Wiwitan merupakan penamaan yang menurut masyarakat Baduy berasal dari asal usul kehidupan dari tanah Sunda. Anggapan dari masyarakat Baduy yaitu bahwa sejak awal atau sejak dahulu agama mereka adalah agama Sunda. Penghormatan kepada roh leluhur serta kepercayaan pada Batara Tunggal merupakan pelaksanaan dari kepercayaan Sunda Wiwitan. Pada kepercayaan Sunda Wiwitan, kekuasaan tertinggi ialah Batara Tunggal yaitu konsep Ketuhanan yang bersifat Tunggal/Esa (Garna, 1988a; Sujana, 2020).

2. Bercocok Tanam

Sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaan masyarakat Baduy yaitu Sunda Wiwitan, bercocok tanam mereka anggap sebagai sebuah kewajiban dalam agama mereka. Dalam bercocok tanam, mereka memiliki berbagai pantangan yang mereka terapkan selama menggarap ladang. Diantaranya, pantang menggunakan benih padi modern, pantang menggunakan pupuk yang anorganik/sintesis, pantang untuk menggunakan pestisida pabrikan, dan mereka pantang untuk memperjual-belikan hasil ladang mereka. Namun, hal tersebut memiliki pengaruh positif seperti para petani yang sangat berhati-hati dalam mengelola ladang, sehingga terjadinya kerusakan pada lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pestisida tidak terjadi. Tentunya hal tersebut sangat baik, karena keseimbangan ekosistem ladang dan sawah dapat tetap terjaga dengan baik (Kameswari, 2020).

3. Cara Berpakaian

Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar memiliki ciri-ciri yang berbeda, terutama terlihat dalam cara berpakaian. Baduy Dalam yang sangat ketat mengikuti adat memakai pakaian berwarna putih alami atau biru pekat dengan ikat kepala berwarna putih. Sedangkan, masyarakat Baduy Luar memakai pakaian serba hitam dengan ikat kepala berwarna hitam (Amaliya, 2018; Ahmad, 2019).

4. Pengangkatan Pu'un/Raja

Dalam menjalankan roda pemerintahan adat, peran pu'un sangatlah penting. Pu'un memiliki kekuasaan serta kewibawaan yang sangat besar. Masyarakat Baduy sangat menaati setiap perkataan dan larangan dari pu'un. Dalam menjalankan tugas, pu'un dibantu oleh seorang jaro yaitu ketua adat yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari (Kartika, 2020).

Pengangkatan seseorang yang akan memiliki kuasa dalam kehidupan pemerintahan adat (pu'un) terbagi ke dalam dua proses. Kedua jalur pengangkatan tersebut yaitu secara lahir dimana calon-calon yang dipilih oleh pu'un sebelumnya ataupun turunan dari pu'un dimusyawarahkan pada forum adat. Dalam pemusyawaratan didiskusikan terkait calon-calon pu'un selanjutnya, para peramal yang dipilih, waktu peramalan, serta unsur-unsur teknis terkait pengangkatan. Selanjutnya, proses secara rohaniah yang dilakukan oleh peramal (nujum) dengan ritual pada sebuah tempat yang telah diyakini bisa menyempurnakan aturan-aturan rohaniah calon pu'un yang telah dipilih dari musyawarah sebelumnya. Peramal bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang kelurusan hati seorang pu'un, wasiat buyut, kemudian pewarisan adat serta hal-hal lainnya (Ulum, 2014).

5. Sistem Gotong-royong

Dugdug rempug merupakan suatu kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat Baduy. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya paksaan tetapi sebagai spontanitas untuk menolong pihak yang membutuhkan pertolongan. Bentuk bantuannya bergantung pada kebutuhan, bisa bantuan tenaga, bantuan materi, atau mungkin bisa keduanya tetapi diselesaikan secara gotong royong. Namun, pada kegiatan *Dugdug rempug* bantuan yang lebih banyak diperlukan umumnya berupa bantuan tenaga. Contohnya, ketika ada kematian di Baduy yaitu peristiwa kematian yang disebut *kaparupuhan*. Bantuan yang dilakukan yaitu membantu segala hal terkait pengurusan jenazah, upacara, dan penguburan serta membantu keluarga berduka untuk keperluan acara kematian (Somantri, 2012).

Implementasi Nilai Pancasila Pada Kearifan Lokal Masyarakat Baduy

1. Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Sujana (2020) tentang kepercayaan atau agama masyarakat Baduy yaitu Sunda Wiwitan yang salah satunya terdapat kepercayaan kepada Batara Tunggal/Tuhan Yang Tunggal/Tuhan Yang Esa. Hal ini merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Masyarakat Baduy mempercayai Tuhan Yang Esa, tercermin pada agama Sunda Wiwitan yang memiliki kepercayaan kepada Batara Tunggal/Tuhan Yang Esa.

2. Pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penerapan Pancasila pada sila ini ialah manusia yang beradab, artinya manusia yang baik budi pekertinya kepada sesama manusia maupun lingkungan disekitarnya. Masyarakat Baduy merupakan salah satu contoh yang mengimplementasikan sila ini pada kegiatan bercocok tanam. Menurut Kameswari (2020), masyarakat Baduy melakukan kegiatan bercocok tanam pada ladang mereka tetapi memiliki berbagai pantangan. Pantangan tersebut diantaranya pantang menggunakan bibit padi modern, pantang menggunakan pupuk yang anorganik, pantang menggunakan pestisida, serta pantang untuk memperjual-belikan hasil ladangnya. Namun, pantangan yang mereka lakukan memiliki dampak yang positif bagi ekosistem lingkungan ladang maupun sawah. Karena kerusakan pada lingkungan akibat dari pemakaian pestisida tidak terjadi, sehingga keseimbangan ekosistem ladang dan sawah tetap terjaga.

3. Pada sila Persatuan Indonesia

Salah satu implementasi sila ini yaitu menjaga warisan budaya Indonesia. Masyarakat Baduy yang menjaga adat istiadatnya dalam cara berpakaian merupakan warisan budaya berpakaian yang terus dijaga. Menurut Amaliya (2018; Ahmad, 2020) menjelaskan bahwa cara berpakaian masyarakat Baduy Dalam dan Luar merupakan kecirikhasan mereka. Masyarakat Baduy Dalam memiliki cara berpakaian serba putih atau hitam pekat dengan ikat kepala berwarna putih. Sedangkan, masyarakat Baduy Luar memiliki cara berpakaian serba hitam dengan ikat kepala berwarna hitam juga.

4. Pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Penerapan dari sila ini salah satunya ialah melakukan musyawarah untuk mufakat. Artinya, ketika dalam pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah akan mendapatkan kesepakatan yang adil dan disetujui seluruh anggota musyawarah. Menurut Ulum (2014), masyarakat Baduy dalam melakukan pemilihan pu'un (orang yang berkuasa pada pemerintahan adat) dilakukan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah tersebut, dihadiri oleh para tokoh adat melalui forum musyawarah adat. Dari situlah, terpilih seorang pu'un selanjutnya.

5. Pada sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Gotong-royong merupakan salah satu penerapan dari sila kelima Pancasila. Masyarakat Baduy telah mengimplementasikan nilai dari sila ini, yaitu kegiatan gotong-royong yang disebut *Dugdug rempug*. Menurut Somantri (2012), kegiatan gotong-royong ini merupakan kegiatan spontanitas untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan pertolongan. Contohnya, saat acara kematian dengan membantu segala hal terkait pengurusan jenazah, upacara, dan penguburan jenazah. Bantuan tersebut dilakukan secara gotong-royong untuk membantu keluarga yang ditinggalkan.

SIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat Baduy ialah adat, istiadat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan oleh masyarakat Baduy pada kearifan lokalnya. Diantaranya, nilai Ketuhanan Yang Esa, nilai gotong-royong, menjaga warisan budaya, menjaga lingkungan (alam), serta musyawarah. Kearifan lokal masyarakat Baduy kental akan nilai-nilai luhur dari pedoman Indonesia yaitu Pancasila, sehingga tercermin kehidupan yang indah dengan tuntunan yang sesuai. Penulis berharap kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda Jawa Barat untuk bisa lebih peka terhadap kearifan lokal masyarakat Baduy yang merupakan warisan Indonesia dengan menghargai, menjaga, serta memperkenalkan agar tetap lestari dan yang lebih penting, dari suku Baduy juga kita bisa mengetahui bahwa Pancasila sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. N. (2019). MENGENALKAN BUDAYA MASYARAKAT BADUY HIDUP SELARAS DENGAN ALAM KEPADA PARA MAHASISWA MELALUI PERKULIHAN LAPANGAN. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).
- Efendi, Y., & Saâ, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 54-65.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(3), 317-324.
- Kameswari, D., & Yusup, M. (2020, July). Kearifan Lokal Bercocok Tanam Pada Masyarakat Pedalaman Suku Baduy. In *SINASIS (Seminar Nasional Sains)* (Vol. 1, No. 1).
- Kartika, T., & Edison, E. (2020). MASYARAKAT BADUY DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT DI ERA DIGITAL. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1).
- Muthmainnah, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Tradisi Nganggung di Kepulauan Bangka Belitung. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 515-521.
- Mulyono, M. (2016). Pancasila sebagai Orthodoxi dan Orthopraxis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Humanika*, 23(2), 40-48.
- Ningsih, I. S. (2021). HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA.
- Somantri, R. A. (2012). Sistem Gotong Royong Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten. *Patanjala*, 4(1), 137-151.
- Sujana, A. M. (2020). Pikukuh: Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 81-92.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Ulum, B. (2014). Nilai-nilai Demokrasi dalam Pengangkatan Puun/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).
- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2).